

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

NOMOR: 218/HK./K.JB-23/10/2023

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA CIMAHI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu

sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan;
dan

- f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 13 Oktober 2023

**Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi**



Fathir Rizkia Latif, S.H.

Tembusan:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

SUSUNAN
SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KOTA CIMAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	FATHIR RIZKIA LATIF, S.H.	KETUA BAWASLU KOTA CIMAH	PEMBINA
2	JUSAPUANDY, S.IP.	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIMAH	PEMBINA
3	AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.M.	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIMAH	PEMBINA
4	AKHMAD YASIN NUGRAHA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIMAH	PEMBINA
5	ZAENAL GINAN, S.Pd., M.Ipol.	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIMAH	PEMBINA
6	SETA DEWA NUGROHO, S.STP., M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA CIMAH	PENANGGUNG JAWAB
7	IWAN SETYAWAN, S.IP.	BPP BAWASLU KOTA CIMAH	KETUA
8	ZAELANI, S.H., M.H.	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
9	MOCH. ASSADILLAH, S.H.	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	HANIFAH NUR RAHMAWATI, S.Pt.	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
11	MIRA SEPTANI R, SM.	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
12	GUNAWAN KUSMANTORO, S.IP., M.H.	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
13	GRIEBALDI, S.H.I., M.H.	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
14	ARTHUR RACHMAN, S.H.	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
15	YUS SUTARYADI, S.T.	STAF PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
16	NURUL MAS ULAH	STAF PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Cimahi
 Pada tanggal 13 Oktober 2023

Ketua
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kota Cimahi


 Fathir Rizkia Latif, S.H.